RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR



TAHUN 2025

i

KATA PENGANTAR

Penyusunan rencana kerja (Renja) merupakan sebuah kegiatan perencanaan tahunan yang

diharapkan mampu memberikan arah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam

melaksanakan kegiatan dalam kurun satu tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan

dan sasaran pokok RPJMD kabupaten LombomTengah 2011-2031 karena perencanaan tahun 2025

tahun taransisi dimana dokumen RPJMD dan Rencana Strategis OPD sudah tersedia , untuk

mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih, yang

mewarnai Rencana Pembangunan Jangka menengah Derah Kabupaten Lombok Tengah .

Rencana kerja ini disusun sebagai salah satu ikhtiar dalam meningkatkan kinerja SKPD

Kantor Camat Praya Timur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan serta pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Akhirnya terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan

dukungan sehingga Rencana kerja ini dapat diselesaikan pada waktunya meskipun tidak sesempurna

yang diharapkan.

Semoga bermanfaat bagi pelaksanaan tugas pengabdian kita kepada negara dan masyarakat.

Amiin.

Mujur, 18 Desember 2023

CAMAT PRAYA TIMUR,

H.LALU FATHURRAHMAN,SH.

NIP.: 196712311986021020

RENJA TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA P	ENG	ANTARi
DAFTA	R ISI	ii
BAB I P	ENDA	AHULUAN
1.	.1.	Latar Belakang1
1.	.2.	Landasan Hukum2
1.	.3.	Maksud dan Tujuan3
1.	.4.	Sistematika Penulisan4-6
BAB II	HASI	L EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU7-14
2.	1.Eva	aluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian
	Rei	nstra Perangkat Daerah
	Pol	kok-pokok Materi yang disajikan,antara lain;
	a)	Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
		hasil yang direncanakan;
	b)	Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil
		yang direncanakan;
	c)	Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil yang
		direncanakan;
	d)	Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
		target kinerja Program/Kegiatan;
	e)	Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra
	·	Perangkat Daerah;
	f)	Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
	,	diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2.	.2. An	alisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
		-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
		kok-pokok materi yang disajikan, antara lain ;
í		ejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perankat Daerah dan hal kritis yang
	to	erkait dengan nelayanan Perangkat Daerah

	b)	Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
		tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
	c)	Danpaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap
		capaian program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
		(Suistanable Development Goais);
	d)	Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
	e)	Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
		ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
		direcnakan.
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat
BAB II	I TU	UJUAN DAN SASARAN PERANGAKAT DAERAH15-18
	3.1	. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanl
		Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
		Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
	3.2	. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
		Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
		Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkata Daerah yang dikaitkan dengan
		sasaran taerget kinerja Renstra Perangkat Daerah.
	3.3	. Program dan Kegiatan
		Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain:
		a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
		program dan kegiatan.
		b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
BAB I	V F	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH19-25
	R	umusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan
	M	Iaju Tahun 2024
,	\	
BAB V	V P	ENUTUP
a)	Ca	tatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
	pel	aksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
	der	ngan kebutuhan.
b)	Ka	idah - kaidah pelaksanaan
c)	Re	ncana tidak lanjut
		-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode 1 (satu) tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Program.

Funsi Renja

- a) Memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang.
- b) Dapat mengukur outcome(hasil) yang harus dicapai
- Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas
- d) Menjadi alat/ media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.
- e) Mempermudah pencapain target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah melahirkan paradigma baru yaitu sistem pemerintahan yang lebih desentralistik. Hal ini membawa implikasi dalam kegiatan perencanaan, dimana pemerintah daerah mempunyai tangung jawab penuh dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pembiayaan pembangunannya. Disamping itu terjadi proses demokratisasi yang lebih nyata, yang ditandai dengan semakin luasnya ruang publik untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan strategi pembangunan daerah.

Sejalan dengan perubahan-perubahan lingkungan strategis dalam tataran normatif dimana peran pemerintah daerah dan masyarakat semakin besar, terdapat tiga isu penting berkaitan dengan kegiatan perencanaan daerah, yaitu peningkatan kualitas proses dan hasil perencanaan, peningkatan kualitas dan hasil monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya daerah yang tersedia dalam rangka meningkatkan kemajuan daerah serta kesejahteraan rakyat.

Oleh karena hasil perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan penganggaran daerah, maka perencanaan mempunyai fungsi yang strategis dalam dinamika pembangunan daerah untuk mendayagunakan potensi dan sumber pembiayaan yang ada dan sangat terbatas.

Kantor Camat Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, adalah Satuan Kerja Perangakat Daerah (SKPD) yang tugas pokoknya membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan umum, pembangunan dan tugas pembantuan serta pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi tersebut, maka Kantor Camat Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah perlu menetapkan tujuan , sasaran, strategi dan program yang akan ditempuh untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dimaksud.

Strategi tersebut dijabarkan dalam berbagai kebijakan dan program yang mempertimbangkan pengaruh internal dan eksternal, baik yang menyangkut peluang , tantangan, kekuatan dan kelemahan yang ada. Keseluruhan pemikiran mengenai arah serta cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas Kantor Camat Praya Timur tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Camat Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 .

1.2. Landasan Hukum

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

- 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut :
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/2435.SJ tanggal 21 September 2005 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan Partisipatif
- 10. Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negera Tanggal 25 Maret 2003 Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031
- 15. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renja

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1(satu) tahun dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasian instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Camat Praya Timur dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

2. Tujuan Penyusunan Renja

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor
 Camat Praya Timur sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 1
 (satu) tahun.
- Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan fokus program/kegiatan selama 1 (satu) tahun .
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama priode RPJMD berkenaan.
- e. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan kebijakan.
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pokok-pokok Materi yang disajikan, antara lain;

- a) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;
- Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;
- Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan;
- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan;
- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah; dan
- f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang peerlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain ;
 - Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perankat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
 - Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c) Danpaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs(Suistanable Development Goais);
 - d) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - e) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direcnakan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGAKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanl

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkata Daerah yang dikaitkan dengan sasaran taerget kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain:

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB V PENUTUP

- a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b) Kaidah kaidah pelaksanaan
- c) Rencana tidak lanjut

BAB II

HASILN EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Belanja Kecamatan terjabar pada DPA-SKPD Kecamatan Praya Timur Tahun 2023 sebesar Rp. 2.822.804.851,- dengan rincian adalah sebagai berikut :

Hasil capaian dari program dan kegiatan dari Belanja Kecamatan Rp. 2.822.804.851,terrealisasi sebesar Rp. 2.773.834.423,- atau sebesar 98,27%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp.2.240.805.452,-
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Rp.14.728.881,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi kinerja SKPD

Outcome : Terbayarnya Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.14.830.500,- (99,33 %),

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah

Untuk melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah

Rp.1.602.441.436,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN, koordinasi

dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD,dan

koordinasi dan penyusunan laporan keuangan

bulanan/triwulan/semesteran SKPD

Outcome : Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN dan

penyusunan Laporan tahunan/ bulanan/triwulan /

semesteran SKPD

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.1.579.504.858,- (98,57%),

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp.87.028.343,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor,penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Outcome : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,perlengkapan kantor,peralatan rumah tangga,bahan logistik kantor, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi

Realisasi: Keuangan sebesar Rp.86.174.920,- (99,02%),

1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp.251.433.180,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Pengadaan Mebel

Outcome : Terpeliharanya perlengkapan kantor

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.245.000.000,- (97,44%),

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Untuk melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp.29.384.122,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Penyediaan jasa surat menyurat,dan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Outcome : Terbayarnya jasa surat menyurat,dan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.25.717.545,- (87,52%),

1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Untuk melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp.255.819.500 ,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan,dan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Outcome : Terpeliharanya kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, gedung kantor dan bangunan lainnya

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.243.122.500,- (95,04%),

- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp. 93.034.120,-
 - 2.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Untuk melaksanakan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp.93.034.120 ,-

dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan

instansi Vertikal Terkait

Outcome : Terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.91.648.000,- (98,51%),

2.2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Untuk melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Rp. 0,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:

Output : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait

dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Outcome : Terlaksananya kegiatan pemerintahan yang dilimpahkan

di tingkat kecamatan

Realisasi : Keuangan sebesar Rp. 0,- (0%)

- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp. 36.237.582,-
 - 3.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Untuk melaksanakan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Rp.29.868.639, - dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Outcome : Terlaksananya Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan di tingkat Kecamatan

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.36.054.000,- (99,49 %)

- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 27.425.000,-
 - 4.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Untuk melaksanakan Kegiatan Kegiatan Koordinasi Upaya

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 27.425.000,-

dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi

Vertikal di Wilayah Kecamatan

Outcome : Terlaksananya Kegiatan Bersama dengan Kepolisian RI,

TNI, instansi vertikal di kecamatan

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.27.404.300,- (99,92%)

5. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Rp. 397.302.697,-

5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Untuk melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Rp. 397.302.697,-

dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,

Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna

Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Outcome : Terlaksananya Kegiatan Bersama dengan Toga, Toma,

Lembaga adat di Tingkat Kecamatan

Realisasi : Keuangan sebesar Rp.396.577.800,- (99,82%)

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 28.000.000,-

6.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa

Untuk melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Rp. 28.000.000,-

dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Fasilitasi Pengelolaan Keungan Desa dan Pendayagunaan

Aset Desa

Outcome : Terlaksananya evaluasi RAPBDes di Tingkat Kecamatan

Realisasi : Keuangan sebesar Rp. 28.000.000,- (100 %)

Pokok-pokok Materi yang disajikan, antara lain;

 a) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;

a.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah:

- penyusunan dokumen pencanaan perangkat daerah, realisasi keuangan = Rp. 2.679.500,- (98,30%)

- koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, realisasi keuangan = Rp.2.266.000,- (99,47%)
- koordinasi dan penyusunan dokumenj perubahan RKA-SKPD,realisasi keuangan =Rp. 1.216.000,- (99,02%)
- koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, realisasi keuangan = Rp. 947.000,(99,91%)
- koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, realisasi keuangan = Rp.2.822.000,- (99,04)

Kagiatan Administrasi Keuangn Perangkat Daerah:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi keuangan Rp,22.906.578,- (98,56 %)
- Koordinasi dan penyusunan Laopran Keuangan Akhir Tahun SKPD,realisai keuangan = Rp. 2.000.000,- (99,70 %)
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD,realisasi keuangan = Rp. 11.190.000,- (99,22 %)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerag:

- Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,realisasi keuangan = Rp. 9.233.000,- (99,19 %)
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi keuangan =Rp.63.334.000,- (99,07)
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, realisai keuangan =Rp.11.777.920,- (98,48 %)

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;

- Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, realisasi keuangan = Rp. 245.000.000,- (97,44)

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi keuangan = Rp. 24.637.545,- (87,05%)

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraaan dinas jabatan, ralisasi keuangan = Rp. 43.567.500,- (78,04 %)
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ,realisasi keuangan = Rp. 199.555.000,- (99,78 %)-

a.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertikal Terkait, realisasi keuangan = Rp. 91.648.000,- (98,51)-

a.3. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Realisasi keuangan = Rp. 36.054.000,-(99,49 %)

a.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan, realisasi keuangan = Rp. 27.404.300,-(99,92 %)

a.5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabiltas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional, realisasi keuangan = Rp.396.577.800,-(99,82%)
- b) Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan;

b.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- b.1.1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , realiasai keuangan = Rp. 4.200.000,-(100 %)
- b.1.2.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, realisasi keuangan = Rp.
 1.830.000- (100 %)
 -
- b.1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa surat Menyurat, realisasi keuangan = Rp.1.080.000,- (100 %)

b.2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

b.2.1. Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, realisasi keuangan = Rp. 28.000.000,- (100 %)
- c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan;
 Tidak Ada
- faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
 Program/Kegiatan; Karena di belanja operasi, belanja bahan bakar dan pelumas
 terjadi turun naiknya harga.
- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;
 Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Praya
 Timur sebagai berikut:
 - 1. Membangun sistem pelayanan berkualitas yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan;
 - **2.** Membangun komitmen aparatur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal;
 - 3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
 - 4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparatur yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
- f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;
 - Sebelum melakukan perencanaan dan penaggaran tahun berikutnya harus melihat perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan anggaran supaya tidak terjadi hambatan/penyebab tidak optimalnya capaian program..

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Lombok Tengah

Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Praya Timur

					Terget dan Rea	lisasi Kinerja Pro	gram dan		Perkiraan Realis	sasi Renstra
			Target Kinerja	Realisasi Target	Kegia	atan Tahun Lalu			Perangkat Daera berjala	-
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegaiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Capaian Program(Renst ra Perangkat Daerah) Tahun (n-3) 2023	Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2021)	Realisai Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Unsur Kewilayahan									
	Program Penunjang Urusan	Nilai SAKIP OPD	В	В	CC	CC		В	В	
	Pemerintahan Daerah		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat		Predikat	Predikat	
	Kabupaten/Kota									
	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	300 %	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan SKPD (RKT, RKT Perubahan,renja, renja perubahan)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	6 dokumen	

Koordinasi dan penyusunan	Laporan Kinerja	12	12	12	12	12	36	
laporan capaian kinerja dan	SKPD	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	
ihktisar realisasi kinerja SKPD								
Kegiatan Administrasi	Persentase temuan	3	3	3	3	3	9	
Keuangan Perangkat Daerah	hasil pemeriksaan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	
	keuangan OPD							
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji	Gaji dan Tunjangan	12	12	12	12	12	36	
dan Tunjangan ASN		Laporan	Laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan	Laporan keuangan	1	1	1	1	1	3	
penyusunan laporan	akhir tahun	Laporan	Laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	
Keuangan Akhir tahun SKPD								
Sub Kegiatan Koordinasi dan	Laporan keuangan	12	12	12	12	12	36	
penyusunan laporan	bulanan /Triwulan/Semestera	Laporan	Laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	
Keuangan	n							
Bulanan/Triwulan/Semesteran								
SKPD								
Kegiatan Administrasi Umum	Persentase							
Perangkat Daerah	penyelesaian pekerja sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	
Sub Kegiatan Penyediaan	komponen isntalasi							
Komponen Instalasi	listrik/penerangan							
Listrik/Penerangan Bangunan		5 jenis	15 jenis					
Kantor								
Sub Kegiatan Penyediaan	Komputer dan							
Peralatan dan perlengkapan	perlengkapannya	1 unit	3 unit					
Kantor								
Sub Kegiatan Penyediaan	peralatan rumah							
peralatan rumah tangga	tangga	5 jenis	15 jenis					

Sub Ke	giatan Penyediaan	Barang cetakan							
bahan	logistik kantor		7 jenis						
	enggaraan Rapat	Laporan hasil rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 lap.						
Koordii SKPD	nasi dan konsultasi		·	'	, i	·	·	·	
Milik D	an Pengadaan Barang Daerah Penunjang n Pemerintahan Daerah	Persentase validasi data aset OPD	4 jenis / 73 jenis	4 jenis / 73 jenis	4 jenis / 73 jenis	4 jenis / 73 jenis	4 jenis / 73 jenis	4 jenis / 73 jenis	
Sub Ke	giatan Pengadaan	Mebel	3 jenis						
Penunj	an Penyediaan Jasa jang Urusan intahan Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	giatan Penyediaan Jasa Menyurat	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12 bulan						
	giatan Penyediaan Jasa nikasi, Sumber Daya Air trik	Lap.Internet	120 mbps						
		Lap. air	6000 m3						
		Lap. Listrik	6.456 kwh						
Barang Penunj	an Pemeliharaan ; Milik Daerah jang Urusan intahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	59 jenis / 398 buah	59 jenis / 398 buah	59 jenis / 398 buah	59 jenis / 398 buah	59 jenis / 398 buah	59 jenis / 398 buah	
Sub Ke	giatan Penyediaan Jasa	Kendaraan dinas terpelihara	14 unit						

Pemeliharaan, Biaya							
Pemeliharaan dan Pajak							
Kendaraan Perorangan Dinas							
atau Kendaraan Dinas Jabatan							
Sub Kegiatan	Gedung kantor yang						
Pemeliharaan/Rehabilitasi	terpelihara/direhab						
Gedung Kantor dan Bangunan		1 unit					
Lainnya							
Program Penyelenggaraan	Persentase						
Pemerintahan dan	penyelenggaraan pelayanan yang	100%	100%	100%	100%	100%	
Pelayanan Publik	dilimpahkan						
Kegiatan Koordinasi	Persentase						
Penyelenggaraan Kegiatan	penyelesaian						
Pemerintahan di Tingkat	bersama kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Kecamatan	pemerintahan di						
	kecamatan						
Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi	Profil kecamatan						
perencanaan dan pelaksanaan							
kegaitan pemerintahan dengan		1 lap.					
perangkat daerah dan instansi							
vertikal terkait							
	Laporan hasil koordinasi pemerintahan umum	1 lap.					
	Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	1 lap.					
Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 lap.	1 lap.	1 lap.	1 lap.	 1 lap.	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Porsentase usulan masyarakat yang disetujui	15%	15%	15%	15%	15%	

Kelurahan							
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Porsentase usulan sesuai prioritas daerah	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %	
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan hasil musrenbang kecamatan	1 lap.					
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	93%	93%	93%	93%	93%	
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120 dok.					
Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang telah di evaluasi R- APBDes	14 desa					
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase urusan pemerintahan umum yang di koordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%	
Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	
Sub Kegiatan Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Laporan pelaksanaan kegaiatan keagamaan dan hari beasar Nasional	1 keg.					
	Tabliq akbar ramadhan	1 keg.					

	Laporan pelaksanaan MTQ/STQ tingkat kecamatan	1 lap.					
	Perayaan HUT RI	1 keg.					
Program Pembinaan dan	Persentase desa						
Pengawasan	yang menyampaikan	93%	93%	93%	93%	93%	
Pemerintahan desa	laporan kinerja						
	tepat waktu						
Kegiatan Fasilitasi,	Dokumen Laporan						
Rekomendasi dan Koordinasi	hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan						
Pembinaan dan Pengawasan	Koordinasi	120 dok.					
Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan						
	Pemerintahan Desa						
Sub Kegiatan Fasilitasi	Jumlah desa yang						
pengelolaan keuangan desa	telah di evaluasi R-	14 desa					
dan pendayagunaan aset desa	APBDes						

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas Kantor Camat Praya Timur perlu dibuat Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output), sebagai berikut :

		CDM/Ctondon		1	Target Renstra F	Perangkat Daer	ah	Realisa	si Capaian	Pro	oyeksi	
No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n +1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase penurunan gangguan trantibum			20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	
	Prosentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat			75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	
	Prosentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder			75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	
4	Nilai kinerja camat			190 Poin	190 Poin	190 Poin	190 Poin	190 Poin	190 Poin	190 Poin	190 Poin	
5	IKM			79 Poin	79 Poin	80 Poin	80 Poin	80 Poin	80 Poin	80 Poin	80 Poin	
	Persentase desa maju di wilayah kecamatan			90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	
7	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang di			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Q	Persentase layanan sesuai SOP			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
9	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu			85 %	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	

	Persentase usulan masyarakat yang di setujui	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	
l	Persentase urusan pemerintahan umum yang koordinasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
 - 1. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima;
 - 2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan;
 - 3. Perkembangan Iptek yang pesat yang tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
 - 4. Membangun komitmen aparatur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal;

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain;

- a) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

 Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah telah menunjukkan tingkat kemajuan yang menggembirakan, hal ini ditunjukkan dengan capaian target kinerja pelayanan publik yang diperjanjikan. Keadaan ini sebagai pengaruh adanya perencanaan yang semakin baik pada sistem perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kantor Camat Praya Timur sebagai berikut;
 - Kuantitas Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di Kantor Camat Timur masih kurang, yang berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.
 - Kurangnya pelatihan pegawai yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Danpaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs(Suistanable Development Goals) adalah;

Ketersediaan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, adanya manajemen kepegawaian yang baik, ketersediaan data yang valid dan akurat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.

 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah;

- Terdapat ketidakseimbangan rasio antara beban kerja SKPD dengan jumlah sarana serta personil yang akan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
- Jumlah anggaran Kantor Camat Praya Timur sebagai sebuah SKPD masih kurang.
- 3. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu.
- 4. Adanya beberapa tugas tambahan yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- e) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direcnakan adalah sebagai berikut.
 - 1. Perijinan;
 - 2. Rekomendasi;
 - 3. Koordinasi;
 - 4. Pembinaan;
 - 5. Pengawasan;
 - 6. Pasilitasi;
 - 7. Penetapan;
 - 8. Penyelenggaraan; dan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4 ReviewTerhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Lombok Tengah

		Rancar	ngan Awal RKPD)			Hasil An	alisis Kebutuhan			Catat
N	Program/Kegiatan/S	Lokasi	Indikator	Target	Pagu	Program/Kegiatan/Su	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan	an
	ub Kegiatan		Kinerja	Capaia	Indikatif(Rp.00	b Kegiatan		Kinerja	Capaia	dana	
				n	0)				n	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN				4.655.045.720	UNSUR KEWILAYAHAN				4.655.045.720	
	KECAMATAN				4.655.045.720	KECAMATAN				4.655.045.720	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ktr.Camat Pratim	Nilai SAKIP OPD	B Predika t	373.260.058	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ktr.Camat Pratim	Nilai SAKIP OPD	B Predika t	373.260.058	
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase IKU OPD yang disetujui	100 %	373.260.058	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase IKU OPD yang disetujui	100 %	373.260.058	
	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan (Renstra Renja)	2 dok.	3.121.006	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan (Renstra Renja)	2 dok.	3.121.006	
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SK		Dokumen RKA SKPD	1 Dok.	1.757.908	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SK		Dokumen RKA SKPD	1 Dok.	1.757.908	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen RKPA SKPD	1 Dok.	1.081.704	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen RKPA SKPD	1 Dok.	1.081.704	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen DPA SKPD	1 Dok.	1.081.704	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen DPA SKPD	1 Dok.	1.081.704	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan		Dokumen DPPA SKPD	1 Dok.	1.081.704	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan		Dokumen DPPA SKPD	1 Dok.	1.081.704	

DPA-SKPD				DPA-SKPD			
Koordinasi dan	Laporan Kinerja		5.491.158	Koordinasi dan	Laporan Kinerja		5.491.158
Penyusunan Laporan	SKPD			Penyusunan Laporan	SKPD		
Capaian Kinerja dan				Capaian Kinerja dan			
Ikhtisar Realisasi				Ikhtisar Realisasi			
Kinerja SKPD				Kinerja SKPD			
Evaluasi Kinerja	Dokumen hasil		5.491.158	Evaluasi Kinerja	Dokumen hasil	3	5.491.158
Perangkat Daerah	evaluasi kinerja	3		Perangkat Daerah	evaluasi kinerja	Dok.	
	kinerja PD (Dok.			kinerja PD (
	LKJIP,LPPD,LKPD)				LKJIP,LPPD,LKPD)		
Administrasi keuangan	Persentase		2.563.590.232	Administrasi keuangan	Persentase	3	2.563.590.232
perangkat daerah	temuan hasil	3		perangkat daerah	temuan hasil	dok.	
	pemeriksaan	dok.			pemeriksaan		
	keuangan OPD				keuangan OPD		
Penyediaan Gaji dan	Gaji dan	20	2.552.666.162	Penyediaan Gaji dan	Gaji dan	20	2.552.666.162
Tunjangan ASN	Tunjangan ASN	dok.		Tunjangan ASN	Tunjangan ASN	dok.	
Tambahan Penghasilan	TPP PNS	20		Tambahan Penghasilan	TPP PNS	20	
berdasrkan beban kerja		dok.		berdasrkan beban kerja		dok.	
PNS				PNS			
Koordinasi dan	Laporan	12	6.080.189	Koordinasi dan	Laporan	12	6.080.189
Penyusunan Laporan	keuangan	Lap.		Penyusunan Laporan	keuangan	Lap.	
Keuangan Bulanan	bulanan SKPD			Keuangan Bulanan	bulanan SKPD		
/Triwulanan/				/Triwulanan/			
Semesteran SKPD				Semesteran SKPD			
Koordinasi dan	Laporan	1	4.843.882	Koordinasi dan	Laporan	1	4.843.882
Penyusunan Laporan	Tahunan SKPD	Lap.		Penyusunan Laporan	Tahunan SKPD	Lap.	
Keuangan Akhir Tahun				Keuangan Akhir Tahun			
SKPD				SKPD			
Administrasi Umum	Persentase	100 %	230.134.512	Administrasi Umum	Persentase	100 %	230.134.512
Perangkat Daerah	penyelesaian			Perangkat Daerah	penyelesaian		
	pekerjaan sesuai				pekerjaan sesuai		
	SOP				SOP		
Penyediaan	komponen		12.623.832	Penyediaan	komponen	5	12.623.832
Komponen Instalasi	isntalasi	5		Komponen Instalasi	isntalasi	jenis	
Listrik/Penerangan	listrik/peneranga	jenis		Listrik/Penerangan	listrik/peneranga		
Bangunan Kantor	n			Bangunan Kantor	n		
Penyediaan Peralatan	Komputer dan	1	146.830.592	Penyediaan Peralatan	Komputer dan	1	146.830.592
dan Perlengkapan	perlengkapannya	Unit		dan Perlengkapan	perlengkapannya	Unit	
Kantor		Offic		Kantor			

	Printer	6			Printer	6	
		Unit				Unit	
	Laptop	2			Laptop	2	
		Unit				Unit	
	alat kebersihan	5			alat kebersihan	5	
		jenis				jenis	
	peralatan dan	2			peralatan dan	2	
	perlengkapan	Jenis			perlengkapan	Jenis	
	lainnya	Jeilis			lainnya		
Penyediaan Peralatan	peralatan rumah	5	34.386.380	Penyediaan Peralatan	peralatan rumah	5	34.386.380
Rumah Tangga	tangga	jenis	34.360.360	Rumah Tangga	tangga	jenis	34.380.380
Penyelenggaraan Rapat	Laporan hasil			Penyelenggaraan Rapat	Laporan hasil		
Koordinasi dan	rapat Koordinasi	4	36.293.708	Koordinasi dan	rapat Koordinasi	4	36.293.708
Konsultasi SKPD	dan Konsultasi	lap.	30.233.700	Konsultasi SKPD	dan Konsultasi	lap.	30.233.700
	SKPD				SKPD		
Pengadaan Barang	Persentase			Pengadaan Barang	Persentase		
Milik Daerah	validasi data	4 jenis /	23.186.156	Milik Daerah	validasi data	4 jenis /	23.186.156
Penunjang Urusan	aset OPD	73 jenis		Penunjang Urusan	aset OPD	73 jenis	
Pemerintah Daerah				Pemerintah Daerah			
Pengadaan Kendaraan	Kendaraan dinas			Pengadaan Kendaraan	Kendaraan dinas		
Perorangan Dinas atau		1 unit		Perorangan Dinas atau		1 unit	
Kendaraan Dinas				Kendaraan Dinas			
Jabatan				Jabatan	Maria de la compansión		
Pengadaan Kendaraan	Kendaraan dinas	1 unit		Pengadaan Kendaraan	Kendaraan dinas	1 unit	
Dinas operasional				Dinas operasional			
Pengadaan Peralatan	peralatan mesin	1 jenis		Pengadaan Peralatan	peralatan mesin	1 jenis	
dan Mesin Lainnya	lainnya	+		dan Mesin Lainnya	lainnya		
Pengadaan Mebel	Mebel	3 jenis		Pengadaan Mebel	Mebel	3 jenis	
Penyediaan Jasa	Persentase			Penyediaan Jasa	Persentase		
Penunjang Urusan	penyelesaian			Penunjang Urusan	penyelesaian		
Pemerintahan Daerah	pekerjaan sesuai	100 %	27.129.773	Pemerintahan Daerah	pekerjaan sesuai	100 %	27.129.773
	SOP dan tepat				SOP dan tepat		
	waktu				waktu		
Penyediaan Jasa Surat	Belanja			Penyediaan Jasa Surat	Belanja		
Menyurat	Langganan	12	1.800.000	Menyurat	Langganan	12	1.800.000
	Jurnal/Surat	bulan	1.800.000		Jurnal/Surat	bulan	1.800.000
	Kabar/Majalah				Kabar/Majalah		
Penyediaan Jasa	Lap.Internet	120	9.183.900	Penyediaan Jasa	Lap.Internet	120	9.183.900
Komunikasi, Sumber		mbps	3.103.900	Komunikasi, Sumber		mbps	3.103.300

Daya Air dan Listrik				Daya Air dan Listrik				
	Lap. air	6000 m3	6.587.119		Lap. air	6000 m3	6.587.119	
	Lap. Listrik	6.456 kwh	8.962.954		Lap. Listrik	6.456 kwh	8.962.954	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	59 jenis / 398 buah	130.327.527	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	59 jenis / 398 buah	130.327.527	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas terpelihara	13 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas terpelihara	13 unit		
	STNK kendaraan dinas yang di perbaharui	13 unit			STNK kendaraan dinas yang di perbaharui	13 unit		
	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	12 bulan			Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	12 bulan		
	Rehabilitasi Kantor Camat	1 paket			Rehabilitasi Kantor Camat	1 paket		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraa n pelayanan yang dilimpahkan	100 %	212.039.414	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraa n pelayanan yang dilimpahkan	100 %	212.039.414	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelesaian bersama kegiatan pemerintahan di kecamatan	100 %		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelesaian bersama kegiatan pemerintahan di kecamatan	100 %		
Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Profil kecamatan	1 lap.		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Profil kecamatan	1 lap.		

perangkat daerah dan				perangkat daerah dan				
instansi vertikal terkait				instansi vertikal terkait				
	Laporan hasil				Laporan hasil			
	koordinasi	1			koordinasi	1		
	pemerintahan	lap.			pemerintahan	lap.		
	umum				umum			
	Laporan				Laporan			
	intensifikasi dan	1			intensifikasi dan	1		
	ekstensifikasi	lap.			ekstensifikasi	lap.		
	PBB				PBB	·		
Pelaksanaan urusan	Dokumen			Pelaksanaan urusan	Dokumen			
pemerintahan yang	Pelaksanaan			pemerintahan yang	Pelaksanaan			
dilimpahkan kepada	urusan	•		dilimpahkan kepada	urusan	•		
camat	pemerintahan	2		camat	pemerintahan	2		
	yang	Dok.			yang	Dok.		
	dilimpahkan				dilimpahkan			
	kepada camat				kepada camat			
Pelaksanaan urusan	Laporan			Pelaksanaan urusan	Laporan			
pemerintahan yang	penyelenggaraan			pemerintahan yang	penyelenggaraan			
terkait dengan	PATEN/IUMK	. 1		terkait dengan	PATEN/IUMK	. 1		
kewenangan lain yang		lap.		kewenangan lain yang		lap.		
dilimpahkan				dilimpahkan				
PROGRAM	Porsentase			PROGRAM	Porsentase			
PEMBERDAYAAN	usulan			PEMBERDAYAAN	usulan			
MASYARAKAT	masyarakat	20%	78.354.079	MASYARAKAT	masyarakat	20%	78.354.079	
DESA DAN KELURAHAN	yang disetujui			DESA DAN KELURAHAN	yang disetujui			
Koordinasi Kegiatan	Porsentase			Koordinasi Kegiatan	Porsentase			
Pemberdayaan Desa	usulan sesuai	45 %		Pemberdayaan Desa	usulan sesuai	45 %		
,	prioritas daerah			·	prioritas daerah			
Peningkatan Partisipasi	Laporan hasil			Peningkatan Partisipasi	Laporan hasil			
Masyarakat Dalam	musrenbang	4		Masyarakat Dalam	musrenbang	4		
Forum Musyawarah	kecamatan	1		Forum Musyawarah	kecamatan	1		
Perencanaan		lap.		Perencanaan		lap.		
Pembangunan di Desa				Pembangunan di Desa				
PROGRAM	Persentase desa			PROGRAM	Persentase desa			
PEMBINAAN DAN	yang	97 %		PEMBINAAN DAN	yang	97 %		
PENGAWASAN	menyampaikan		99.299718	PENGAWASAN	menyampaikan		99.299718	
PEMERINTAHAN DESA	laporan kinerja			PEMERINTAHAN DESA	laporan kinerja			
	tepat waktu				tepat waktu			

Fasilitasi, Rekomendasi	Dokumen			Fasilitasi, Rekomendasi		Dokumen			
dan Koordinasi	Laporan hasil			dan Koordinasi		Laporan hasil			
Pembinaan dan	Fasilitasi,			Pembinaan dan		Fasilitasi,			
Pengawasan	Rekomendasi			Pengawasan		Rekomendasi			
Pemerintahan Desa	dan Koordinasi	120		Pemerintahan Desa		dan Koordinasi	120		
	Pembinaan dan	dok.				Pembinaan dan	dok.		
	Pengawasan					Pengawasan			
	Pemerintahan					Pemerintahan			
	Desa					Desa			
Fasilitasi pengelolaan	Jumlah desa			Fasilitasi pengelolaan		Jumlah desa			
keuangan desa dan	yang telah di	14		keuangan desa dan		yang telah di	14		
	evaluasi R-	Desa				evaluasi R-	desa		
pendayagunaan aset	APBDes	Desa		pendayagunaan aset		APBDes	uesa		
desa				desa			1		
PROGRAM	Persentase			PROGRAM		Persentase			
KOORDINASI	pengendalian	100 %	53.009.853	KOORDINASI		pengendalian	100 %	53.009.853	
KETENTRAMAN DAN	gangguan			KETENTRAMAN DAN		gangguan			
KETERTIBAN UMUM	ketertiban			KETERTIBAN UMUM		ketertiban			
	masyarakat					masyarakat			
Koordinasi upaya	Presntase	70 %		Koordinasi upaya		Presntase	70 %		
penyelenggaraan	gangguan			penyelenggaraan		gangguan			
keterntraman dan	tratibum yang			keterntraman dan		tratibum yang			
ketertiban umum	ditangani			ketertiban umum		ditangani			
Sinergitas dengan	Laporan hasil	1		Sinergitas dengan		Laporan hasil	1		
kepolisian negara	patroli terpadu	lap.		kepolisian negara		patroli terpadu	lap.		
republik indonesia,	kecamatan	-		republik indonesia,		kecamatan			
tentara nasional				tentara nasional					
indonesia dan instansi				indonesia dan instansi					
vertikal di wilayah				vertikal di wilayah					
kecamatan				kecamatan					
PROGRAM	persentase			PROGRAM		persentase			
PENYELENGGARAAN	urusan			PENYELENGGARAAN		urusan			
URUSAN	pemerintahan	100 %	373.260.058	URUSAN		pemerintahan	100 %	373.260.058	
PEMERINTAHAN	umum yang di	100 /0	3,3,200,030	PEMERINTAHAN		umum yang di	100 /0	3,3,200,030	
UMUM	koordinasikan			UMUM		koordinasikan			
Penyelenggaraan	Persentase	90 %		Penyelenggaraan		Persentase	90 %		
urusan pemerintahan	konflik sosial	3U 70		urusan pemerintahan		konflik sosial	30 %		
•	•			urusan pemerintanan umum sesuai		•	1		
umum sesuai	yang					yang			
penugasan kepala	diselesaikan			penugasan kepala		diselesaikan	1		
daerah				daerah	1				l

Pembinaan kerukunan		Laporan	1 keg.	Pembinaan kerukunan	Laporan	1 keg.	
antarsuku dan		pelaksanaan		antarsuku dan	pelaksanaan		
intrasuku, umat		kegaiatan		intrasuku, umat	kegaiatan		
beragama, ras dan		keagamaan dan		beragama, ras dan	keagamaan dan		
golongan lainnya guna		hari beasar		golongan lainnya guna	hari beasar		
mewujudkan stabilitas		Nasional		mewujudkan stabilitas	Nasional		
keamanan lokal,				keamanan lokal,			
regional dan nasional				regional dan nasional			
		Tabliq akbar			Tabliq akbar		
	1	ramadhan			ramadhan		
		Laporan			Laporan		
		pelaksanaan			pelaksanaan		
		MTQ/STQ			MTQ/STQ		
		tingkat			tingkat		
		kecamatan			kecamatan		
		Perayaan HUT RI		_	Perayaan HUT RI		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGAKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanl

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang telah ditetapkan Kantor Camat Praya Timur adalah:

- Koordinasi Kecamatan dengan stakeholder
- Peningkatan layanan administrasi
- Peningkatan kualitas layanan
- Peningkatan Laporan Keuangan dan Kinerja kecamatan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan, sasaran ini diarahkan dalam upaya melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, khususnya misi kesatu, " Merawat Ahlaqul Karimah dalam kehidupan bermasyarakat " dan .Misi ketiga "Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih".

Tujuan

Dalam rangka mendukung upaya meningkatkan layanan pemerintah dalam pelayanan publik, Kantor Camat Praya Timur, bertujuan:

- Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat.

Indikator tujuan adalah : Persentase penurunan gangguan trantibum

- Meningkatnya kinerja kecamatan

Indikator tujuan adalah : Nilai kinerja camat

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Praya Timur dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas adalah :

- Meningkatnya peranserta masyarakat dan steke holder terkait dalam pengendalian trantibum

Indikator sasaran adalah:

- Prosentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat
- Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder
- Meningkatnya kualitas layanan Publik.

Indikator sasaran adalah:

Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Indikator sasaran adalah:

Persentase desa maju di tingkat kecamatan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Camat Praya Timur beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 3.1sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025
Kabupaten Lombok Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATAOR SASARAN	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat.		Persentase penurunan gangguan trantibum	25%	30%
		Meningkatnya peranserta masyarakat dan steke holder terkait dalam pengendalian trantibum	Prosentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat	75%	75%
			Prosentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder	75%	75%
	Meningkatnya kinerja kecamatan		Nilai kinerja camat	200 poin	215 poin
		Meningkatnya kualitas layanan Publik	IKM	81 poin	86 poin
		Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	100%	100%
			Persentase penyelenggaraan pelayanan yang di limpahkan	100 %	100 %

	Persentase layanan sesuai SOP	100 %	100 %
	Persentase desa yang menyampaikan	93 %	97 %
	laporan kinerja tepat waktu		
	Persentase usulan masyarakat yang di	15 %	20 %
	setujui		
	Persentase urusan pemerintahan	100 %	100 %
	umum yang koordinasikan		

3.3. Program dan Kegiatan

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain:

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- Adanya kenaikan atau penurunan harga
- Perbedaan harga antara yang tertuang dalam DPA SKPD dengan harga real di pasaran
 - b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Rekapitulasi Program dan Kegiatan yang terselenggara dan terjabar pada DPA-SKPD Kecamatan Praya Timur adalah :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:

- Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi keuangan perangkat daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Koordinasi upaya penyelenggaraan keterntraman dan ketertiban umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

BAB IV Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Lombok Tengah

	Urusan/Bidang Urusan							Perkira	an Maju
	Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja		Rencana	Tahun 2025		Catatan	Та	hun
Kode	dan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Penting	20	026
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Regiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR KEWILAYAHAN		Kantor Camat Praya Timur		4.655.045.720				5.109.924.712
	KECAMATAN				4.655.045.720				5.109.924.712
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		B predikat	373.260.058			B predikat	410.586.064
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang disetujui		100 %	373.260.058	DAU		100 %	410.586.064
	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan (Renstra Renja)		2 dok.	3.121.006	DAU		2 dok.	3.433.107
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SK	Dokumen RKA SKPD		1 Dok.	1.757.908			1 Dok.	1.933.698
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen RKPA SKPD		1 Dok.	1.081.704			1 Dok.	1.189.874
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD		1 Dok.	1.081.704			1 Dok.	1.189.874
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPPA SKPD		1 Dok.	1.081.704 4			1 Dok.	1.189.874

Koordinasi dan Penyusun Laporan Capaian Kinerja	, ,	12 Lap.	5.491.158		12 Lap.	
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.040.273
Evaluasi Kinerja Perangka Daerah	t Dokumen hasil evaluasi kinerja kinerja PD (LKJIP,LPPD,LKPD)	3 Dok.	5.491.158		3 Dok.	6.040.273
Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	3 dok.	2.563.590.232		3 dok.	2.563.590.232
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	20 dok.	2.552.666.162	DAU	20 dok.	2.807.932.778
Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Bulan /Triwulanan/ Semesterar SKPD	an SKPD	18 dok.	6.080.189		18 Lap.	5.328.270
Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	an Laporan Tahunan SKPD	12 Lap.	4.843.882		1 Lap.	6.688.208
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100 %	230.134.512		100 %	253.147.963
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	komponen isntalasi an listrik/penerangan	5 Jenis	12.623.832		5 jenis	13.886.215
Penyediaan Peralatan da Perlengkapan Kantor	n Komputer dan perlengkapannya	1 Unit	146.830.592		1 unit	161.513.651
	Printer	6 Unit			6 unit	
	Laptop	2 Unit			2 unit	
	alat kebersihan	5 Jenis			5 jenis	
	peralatan dan perlengkapan lainnya	2 Jenis			2 jenis	
Penyediaan Peralatan Ru Tangga	mah peralatan rumah tangga	5 Jenis	34.386.380		5 jenis	37.825.018
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultas SKPD	Laporan hasil rapat Koordinasi i dan Konsultasi SKPD	4 lap.	36.293.708		4 lap.	39.923.079
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uruso Pemerintah Daerah		4 jenis / 73 jenis	23.186.156		4 jenis / 73 jenis	25.504.771
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas	1 unit			1 unit	
Pengadaan Kendaraan Di		1 unit			1 unit	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Eelanja Sapara Persentase penyelesaian pekerjaan sessual SOP dan tepta waktu 12 bulan 1.800.000 12 bulan 1.800	operasional						
Pengadaan Mebel	Pengadaan Peralatan dan	peralatan mesin lainnya	1 jenis			1 jenis	
Penyediaan lasa Penunjang Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu 29.842.71	Mesin Lainnya						
Durson Pemerintahan Decerb Eapt waktu 29.842.75	Pengadaan Mebel	Mebel	3 jenis	21.078.323		3 jenis	25.504.771
Perryediaan Jasa Surat Redaraan Juraal/Surat Perryediaan Jasa Surat Redaraan Juraal/Surat Re	Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase penyelesaian	100 %	24.663.430		100 %	
Peryediaan Jasa Surat Belanja Langganan Jurnal/Surat Labar/Majalah 1.800.000 12 bulan 1.800.000 12 b	Urusan Pemerintahan	pekerjaan sesuai SOP dan					29.842.75
Menyurat Kabar/Majalah 1.800.000 1	Daerah	tepat waktu					
Menyurat Kabar/Majalah 120 mbps 10.102.25 10	Penyediaan Jasa Surat	Belanja Langganan Jurnal/Surat	12 bulan	1 000 000		12 bulan	1 900 000
Sumber Daya Air dan Listrik Lap. air Lap. air Common Sparang Milik Daerah Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Aperlaharui STNK kendaraan dinas yang di perbaharui STNK kendaraan dinas yang di perbaharui Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor PROGRAM PEMERIKTAHAN DAN PEMERIKTAHAN DAN PEMERIKTAHAN DAN PEMERIKTAHAN DAN PEMERIKTAHAN DAN Pemelenda di Keanatan Pemerintahan Dalik Koordinasi Pereventase penyelesaian Pemerintahan Dalik Koordinasi Pemerintahan Dalik Persentase penyelesaian Pemerintahan dal Tingkat Pesana Bangunan Lainya Belanja Penselasan bersama kegiatan Pemerintahan Dalik Persentase penyelesaian bersama kegiatan Pemerintahan dal Tingkat	Menyurat	Kabar/Majalah		1.800.000			1.800.000
Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Lap.Internet	120 mbps	0.240.000		120 mbps	40 402 20
Lap. Listrik S.988.90 S.988.90 N.245.88				8.349.000		·	10.102.29
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Diaas Jabatan STNK kendaraan dinas terpelihara STNK kendaraan dinas yang di Perbaharui Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Kantor PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Persentase penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Persentase penyelesaian Pemerintahan di Kecamatan		Lap. air	6000 m3	5.988.290		6000 m3	7.245.831
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan dinas terpelihara 14 Unit		Lap. Listrik	6.456 kwh	8.148.140		6.456 kwh	9.859.249
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan dinas terpelihara 14 Unit	Pemeliharaan Barana Milik	Persentase RMD kondisi haik	59 ienis / 398	118 479 570		59 ienis / 398	
Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan STNK kendaraan dinas yang di perbaharui Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor PROGRAM PENYELENGGARAAN PENELENGGARAAN PENERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Pemerintahan di Tingkat Pemerintahan di Recamatan STNK kendaraan dinas terpelihara 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 15 14 Unit 16 14 Unit 16 14 15 14 15 14 15 14 15 15 16 17 18 18 19 19 10 10 10 100 100 100 100 100 100	_	T CISCINUSC BIVID KONGISI BUIK		110.475.570			143 360 29
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan STNK kendaraan dinas yang di perbaharui STNK kendaraan dinas yang di perbaharui Dinit Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Bangunan Gedung Kantor PROGRAM PENYELINGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintohan di Tingkat Persentase penyelesaian pemerintohan di Tingkat Kendaraan dinas terpelihara 14 Unit Unit 14 Unit 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12			buun			, such	143.300.20
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan STNK kendaraan dinas yang di perbaharui Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Uni		Kendaraan dinas ternelihara	14			14	
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan STNK kendaraan dinas yang di perbaharui Delanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Persentase penyelesiain Persenta		Kendardan dinas terpelinara					
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan STNK kendaraan dinas yang di perbaharui Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Uni			Onic			unit	
atau Kendaraan Dinas Jabatan STNK kendaraan dinas yang di perbaharui Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Persentase penyelesaian Pemerintahan di Kecamatan				118.479.570			143.360.2
Jabatan STNK kendaraan dinas yang di perbaharui Delumas Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat STNK kendaraan dinas yang di 14 Unit Unit 12 12 12 12 12 12 12 14 10 12 14 10 10 10 10 10 100 11 11	9						
STNK kendaraan dinas yang di perbaharui 14 Unit 15 Unit 16 Unit 17 Unit 17 Unit 17 Unit 17 Unit 17 Unit 17 Unit 18 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12 Dulan 12 Dulan 12 Dulan 14 Unit 17 Deket 15 Dulan 15 Dulan 16 Dulan 17 Daket 17 Daket 18 Dulan 19 Daket 19 Dulan 19 D							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Delayanan yang dilimpahkan di Ingkat dan Delayanan yang dilimpahkan di Ingkat dan Demerintahan di Tingkat dan Demerintahan di Kecamatan dan Demerintahan di	Japatan	STNK kendaraan dinas yang di	14			14	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor Bangunan Lainya PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Belanja Pemeliharaan 1 paket							
Pelumas Bulan bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kerja-Bangunan Gedung Kantor PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Pelumas Bulan bulan 1 paket 1 pa							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Persentase penyelesian bersama kegiatan pemerintahan di kecamatan 1 paket							
Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor 100 % 192.360.894 DAU 100 % 233.243.3	Pemeliharaan/Rehahilitasi					<u> </u>	
Bangunan Lainya Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kerja- Bangunan Gedung Kantor 100 % 192.360.894 DAU 100 % 233.243.3	•		1 parce			1 paket	
PROGRAM Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Bangunan Gedung Kantor 100 % 192.360.894 DAU 100 % 233.243.3	9	5 5					
PROGRAM Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Persentase penyelesaian pemerintahan di kecamatan PROGRAM PESENTASE penyelenggaraan 100% 192.360.894 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Daniganan Lamya						
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Pemerintahan di kecamatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat		bullgullari dedulig kulltoi					
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Pemerintahan di kecamatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	PROGRAM	Persentase penyelenaaaraan	100 %	192,360.894	DAU	100	
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pensentase penyelesaian 100 % 192.360.894 100 Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat pemerintahan di kecamatan 233.243.3	PENYELENGGARAAN						
PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Persentase penyelesaian 100 % 192.360.894 100 Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat pemerintahan di kecamatan 233.243.3	PEMERINTAHAN DAN	p					233.243.3
Koordinasi Persentase penyelesaian 100 % 192.360.894 100 % Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat pemerintahan di kecamatan 100 % 192.360.894 233.243.3							
Penyelenggaraan Kegiatan bersama kegiatan pemerintahan di Tingkat pemerintahan di kecamatan 9% 233.243.3		Persentase penvelesaian	100 %	192.360.894		100	
Pemerintahan di Tingkat pemerintahan di kecamatan 233.243.3			1 200 /2				
	,	_				~	233.243.3
	_						

Koordinasi/sinergi	Jumlah Laporan	4	192.360.894	4	212.039.414
perencanaan dan	Koordinasi/sinergi perencanaan	lap.		lap.	
pelaksanaan kegiatan	dan pelaksanaan kegiatan				
pemerintahan dengan	pemerintahan dengan				
perangkat daerah dan	perangkat daerah dan instansi				
instansi vertikal terkait	vertikal terkait				
	Profil kecamatan	1		1	
		lap.		lap.	
	Laporan hasil koordinasi	1		1	
	pemerintahan umum	lap.		Lap	
		·		·	
	Laporan intensifikasi dan	1		1	
	ekstensifikasi PBB	Lap.		lap.	
Pelaksanaan urusan	Dokumen Pelaksanaan urusan	2		2	
pemerintahan yang	pemerintahan yang	Dok		Dok.	
dilimpahkan kepada camat	dilimpahkan kepada camat				
Pelaksanaan urusan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	2		2	
pemerintahan yang terkait	kewenangan lain yang	Lap.		lap.	
dengan kewenangan lain	dilimpahkan	·		·	
yang dilimpahkan	·				
, , ,	Laporan penyelenggaraan	1		1	
	PATEN/IUMK	lap.		lap.	
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Porsentase usulan masyarakat	20%	71.082.354	25	
MASYARAKAT	yang disetujui		7 = 100 = 100 1	<u> </u>	86.189.486
DESA DAN KELURAHAN	yang aisetajai				0012031400
Koordinasi Kegiatan	Porsentase usulan sesuai	45 %	71.082.354	50	
Pemberdayaan Desa	prioritas daerah	43 /0	71.002.334	%	86.189.486
Peningkatan Partisipasi	Laporan hasil musrenbang	1	71.082.354	1	
Masyarakat Dalam Forum	kecamatan	lap.	71.082.534	lap.	
Musyawarah Perencanaan	Recamatan	тар.		тар.	86.189.486
Pembangunan di Desa PROGRAM PEMBINAAN		25.0/	00.004.442	100	
	Persentase desa yang	95 %	90.084.113	100	400 220 600
DAN PENGAWASAN	menyampaikan laporan kinerja			%	109.229.690
PEMERINTAHAN DESA	tepat waktu				
Fasilitasi, Rekomendasi dan	Laporan hasil Fasilitasi,	120	90.084.113	120	
Koordinasi Pembinaan dan	Rekomendasi dan Koordinasi	dok.		dok.	109.229.690
Pengawasan Pemerintahan	Pembinaan dan Pengawasan				
Desa	Pemerintahan Desa				
Fasilitasi pengelolaan	Jumlah desa yang telah di	14	90.084.113	18	
keuangan desa dan	evaluasi R-APBDes	desa		Desa	109.229.690
pendayagunaan aset desa					
PROGRAM KOORDINASI	Persentase pengendalian	100 %	48.090.224	100	58.310.839
KETENTRAMAN DAN	gangguan ketertiban			%	
KETERTIBAN UMUM	Masyarakat				

Koordinasi upaya penyelenggaraan keterntraman dan ketertiban umum	Presntase gangguan tratibum yang ditangani	70 %	48.090.224	75 %	58.310.839
Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Laporan Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 lap.	48.090.224	12 lap.	58.310.839
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase urusan pemerintahan umum yang di koordinasikan	100 %	338.619.303	100 %	410.586.064
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	90 %	338.619.303	95 %	410.586.064
Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Laporan pelaksanaan kegaiatan keagamaan dan hari beasar Nasional	1 keg.	338.619.303	1 keg.	410.586.064
	Tabliq akbar ramadhan	1 keg.		1 keg.	
	Laporan pelaksanaan MTQ/STQ tingkat kecamatan	1 lap		1 lap	
	Perayaan HUT RI	1 lap		1 lap	
	Carnaval Vestifal Bau Nyale	1 lap.		1 lap.	

CAMAT PRAYA TIMUR,

H.LALU FATHURRAHMAN,SH.

NIP.196712311986021020

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat kami simpulkan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik (Good Government) perlu didukung dengan kemampuan dana / anggaran yang memadai, Sumber Daya Manusia, Peralatan serta sumber pendukung lainnya yang memadai.

Disamping itu penetapan prioritas pembangunan yang meliputi berbagai aspek sangat urgen untuk dilakukan. Prioritas itu meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas sarana dan infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat seperti : jalan, jembatan, perbaikan pasar,terminal dan lain-lain.
- 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di semua bidang pokok yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat.
- 3. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk mensukseskan setiap program pemerintah, yang diikuti dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang.
- 4. Terus mengupayakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang telah ada dan mendorong masyarakat untuk membiasakan diri dengan budaya hidup sehat.
- 5. Menjaga dan mempertahankan kondisi keamanan yang semakin kondusif, dengan meningkatkan kerjasama antara aparat keamanan dengan masyarakat.

2. SARAN-SARAN

1. Pemerintah atasan hendaknya terus melakukan analisa dan kajian-kajian di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, stabilitas daerah dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah.

2. Meningkatkan anggaran SKPD Kecamatan sebagai unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan.

> Mujur, Januari 2024 CAMAT PRAYA TIMUR,

H.LALU FATHURRAHMAN,SH.

NIP.: 196712311986021020